

Katalog BPS: 7102040.76

Ringkasan Eksekutif
Perkembangan Nilai Tukar Petani
Sulawesi Barat
Semester II 2014



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ringkasan Eksekutif

**Perkembangan Nilai Tukar Petani
Sulawesi Barat**

Semester II 2014

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat

Semester II 2014

ISBN : 978-602-0845-08-1

Nomor Publikasi : 76540.1501

Katalog BPS : 7102040.76

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : viii + 16 halaman

Naskah : Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit : Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak Oleh : CV. Walima Jaya

Boleh Dikutip Dengan Menyebutkan Sumbernya



KATA PENGANTAR

Ringkasan Eksekutif “Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Barat Semester II 2014” ini merupakan publikasi ringkas yang berisikan perkembangan NTP secara umum, perkembangan NTP menurut subsektor, serta perkembangan indeks harga perdesaan Sulawesi Barat yang menggambarkan tingkat inflasi/deflasi perdesaan.

Publikasi ini berisi data yang *up to date*, sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, dalam publikasi ini ditambahkan beberapa konsep dan definisi yang mempermudah pengguna data dalam membaca dan memahami isian di dalamnya.

Diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para pengguna data. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Mamuju, Februari 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat

Setianto, SE, M.Si

VISI DAN MISI
Badan Pusat Statistik

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

- a. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;**
- b. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, di dukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;**
- c. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik**
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua.**
- e. Meningkatkan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Arti dan Kegunaan NTP	2
1.3. Konsep dan Definisi	4
BAB II. PEMBAHASAN	
2.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat Semester II Tahun 2014	8
2.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat Menurut Subsektor, Juli - Desember 2014	9
2.2.1. Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P)	10
2.2.2. Subsektor Hortikultura (NTP-H)	10
2.2.3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R)	11
2.2.4. Subsektor Peternakan (NTP-T)	11
2.2.5. Subsektor Perikanan (NTPN)	11
2.3. Perkembangan Inflasi Perdesaan	12
2.4. Perbandingan Antar Provinsi Se-Sulawesi	12
LAMPIRAN	14

<http://sulbar.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya daerah pedesaan sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan pembangunan sektor pertanian, karena sektor ini masih sangat mendominasi daerah pedesaan. Sektor pertanian disini adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan salah satunya dengan cara bertani. Sungguh sangat disayangkan jika sektor pertanian tidak dapat dikelola dengan baik karena akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan petani. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan dan masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat diharapkan sektor pertanian ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan tersebut selain dapat dilihat menggunakan data tentang pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga data tentang ukuran tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani.

Yang dimaksud dengan Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. It merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari sisi kebutuhan petani baik

untuk konsumsi maupun produksi. Bila I_t atau I_b lebih besar dari 100, berarti I_t atau I_b lebih tinggi dibandingkan I_t atau I_b pada tahun dasar.

Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

Badan Pusat Statistik dalam menyusun NTP telah beberapa kali menggunakan tahun dasar yang berbeda. NTP yang pertama yaitu menggunakan tahun dasar tahun 1976 ($1976=100$), kemudian tahun 1983 ($1983=100$), dan tahun 1993 ($1993=100$). Seiring dengan terjadinya banyak perubahan baik dalam pergeseran nilai produksi komoditas pertanian maupun pola konsumsi (besaran nilai dan jenis variasi komoditas) penduduk pedesaan, maka tahun dasar NTP $1993=100$ diubah ke tahun dasar 2007 ($2007=100$) mulai Bulan Mei 2008.

1.2 Arti dan Kegunaan NTP

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

1. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
2. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase

kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Sebagai bahan/indikator pengukur tingkat keberhasilan pembangunan NTP memiliki banyak kegunaan dan manfaat, antara lain adalah:

1. Dari indeks harga yang diterima petani (It) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
2. Dari kelompok konsumsi rumahtangga dalam indeks harga yang dibayar petani (Ib), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan.
3. Nilai tukar petani mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. Hal ini terlihat bila dibandingkan dengan kemampuan tukarnya pada tahun dasar. Dengan demikian, NTP dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani.

1.3 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam penghitungan NTP antara lain:

1. **Nilai tukar petani** adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
2. **Indeks harga yang diterima petani** adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen hasil produksi petani.
3. **Indeks harga yang dibayar petani** adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumahtangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi rumahtangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.
4. **Petani** yang dimaksud disini adalah Seseorang atau sekelompok orang yang mengusahakan komoditas pertanian atas resiko sendiri ataupun bagi hasil dengan tujuan untuk dijual baik sebagian atau seluruhnya pada pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan (tangkap dan budidaya) dan kehutanan. Dalam hal ini termasuk ke dalam kategori petani adalah petani penyewa lahan, dan penggarap (bebas sewa maupun bagi hasil). Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.

5. **Harga yang diterima petani** adalah rata-rata harga dari suatu jenis komoditas (produksi) dari petani produsen sebelum memasukkan biaya untuk transportasi atau pengangkutan dan pengepakan ke dalam harga penjualannya atau disebut *Farm Gate* (harga di sawah, ladang, kebun setelah pemetikan). Pengertian harga rata-rata adalah harga yang bila dikalikan dengan volume penjualan petani akan mencerminkan total uang yang diterima petani tersebut. Data harga tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani produsen.
6. **Harga yang dibayar petani** adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Data harga barang untuk keperluan produksi pertanian dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani, sedangkan harga barang/jasa untuk keperluan konsumsi rumahtangga dicatat dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau penjual jasa di pasar terpilih.
7. **Pasar** adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli atau tempat yang biasanya terdapat penawaran dan permintaan. Pada kecamatan yang sudah terpilih sebagai sampel, pasar yang dicatat haruslah pasar yang cukup mewakili dengan syarat antara lain: paling besar, banyak pembeli dan penjual, jenis barang yang diperjualbelikan cukup banyak dan terjamin kelangsungan pencatatan harganya, serta terletak di desa perdesaan (rural).

8. **Harga eceran perdesaan** adalah harga transaksi antara penjual dan pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kepada pihak lain. Harga yang dicatat adalah harga modus (yang terbanyak muncul) atau harga rata-rata biasa dari beberapa pedagang/penjual yang memberikan datanya.
9. Formula atau rumus yang digunakan pada penghitungan It dan Ib adalah formula Indeks Laspeyres yang dikembangkan (*Modified Laspeyres Indexes*), yaitu:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

- I_n : Indeks harga bulan ke-n (It maupun Ib)
- P_{ni} : Harga bulan ke-n untuk jenis barang ke-i
- $P_{(n-1)i}$: Harga bulan ke-(n-1) untuk jenis barang ke-i
- $P_{ni}/P_{(n-1)i}$: Relatif harga bulan ke-n untuk jenis barang ke-i
- P_{oi} : Harga pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
- Q_{oi} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
- m : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas.

10. Formula untuk penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP):

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Keterangan:

NTP : Nilai Tukar Petani

I_t : Indeks harga yang diterima petani

I_b : Indeks harga yang dibayar petani

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat

Selama semester II tahun 2014, pergerakan nilai tukar petani (NTP) Sulawesi Barat memperlihatkan *trend* yang kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan karena pergerakan NTP selama semester II tahun 2014 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada awal semester II tahun 2014, NTP Sulawesi Barat dibuka pada titik 102,85 kemudian mengalami sedikit penurunan pada bulan Agustus menjadi 102,74. Pada bulan September 2014, NTP Sulawesi Barat mengalami peningkatan menjadi sebesar 103,37 dan mencapai puncaknya selamata semester II pada bulan Oktober menjadi sebesar 104,56 atau meningkat sekitar 1,15 persen. NTP Sulawesi Barat pada bulan November mengalami penurunan menjadi sebesar 103,95 dan mencapai titik terendah pada Bulan Desember dengan NTP sebesar 101,40. Penurunan yang cukup tajam ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi (premium). Kenaikan harga premium menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Kondisi ini menyebabkan indeks konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu komponen indeks yang dibayar petani, meningkat. Akibatnya, NTP Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan petani sedikit lebih rendah pada akhir semester II tahun 2014 dibanding awal semester II tahun 2014.

Dalam kurun waktu semester II tahun 2014, nilai NTP tertinggi Sulawesi Barat terjadi di bulan Oktober yang mencapai 104,56 dengan indeks

yang diterima petani (It) mencapai 116,25 lebih tinggi dibanding indeks yang dibayar petani (Ib) yang hanya berkisar 111,18. NTP Sulawesi Barat yang terendah terjadi di bulan Desember yang berkisar 101,40 dengan It dan Ib masing-masing 116,07 dan 114,47.

Jika diukur dari NTP, kesejahteraan petani Sulawesi Barat secara umum yang cenderung mengalami penurunan, diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut tentunya harus didukung dengan kebijakan dari pemerintah yang benar-benar riil agar petani Sulawesi Barat pada khususnya dapat lebih sejahtera. Misalnya dengan membuka regulasi pemberian bantuan dan penyuluhan kepada petani.

2.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat Menurut Sub sektor, Juli – Desember 2014.

NTP dibentuk oleh 5 (lima) sub sektor. Kelima sub sektor tersebut adalah sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor tanaman perkebunan rakyat, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan.

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa komponen pembentuk NTP masih cukup bervariasi, dan masih terdapat dua subsektor yang nilai di bawah angka 100. Subsektor yang masih di bawah 100 diantaranya adalah subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan. Rendahnya NTP pada kedua subsektor tersebut dikarenakan indeks yang harus dibayarkan petani lebih tinggi dibanding indeks yang diterima petani. Pada bulan Agustus 2014 misalnya, indeks yang diterima petani pada subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan masing-masing sebesar 101,05 dan 108,81 lebih rendah

dari indeks yang dibayarkan petani yang mencapai 110,72 pada subsektor tanaman pangan dan 111,23 pada subsektor perikanan. Rendahnya NTP pada kedua subsektor ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

2.2.1. Subsektor Tanaman Pangan (NTPP)

Sub sektor pertanian tanaman pangan adalah salah satu sub sektor yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena selama periode Juli – Desember 2014 NTP sub sektor ini masih di bawah 100. Hal ini disebabkan oleh tingginya indeks yang harus dibayarkan petani dibanding indeks yang diterima petani. Pada semester II tahun 2014, indeks yang diterima petani mencapai 102,76. Kondisi ini mengalami sedikit peningkatan sekitar 1,32 persen dari semester sebelumnya. Sedangkan pada periode yang sama indeks yang dibayarkan petani mengalami kenaikan sebesar 3,10 persen dari 108,4 pada semester I tahun 2014 menjadi 111,39 pada semester II tahun 2014, yang berdampak pada turunnya NTP sub sektor ini sebesar 1,73 persen.

2.2.2. Subsektor Hortikultura (NTPH)

NTP sub sektor hortikultura didukung oleh sub kelompok buah-buahan dan sub kelompok sayur-sayuran memperlihatkan pola yang berbeda dengan sub sektor tanaman pangan. NTPH selama semester II tahun 2014 cenderung di atas 100, kecuali pada bulan Agustus yang nilainya sebesar 99,88. Selama semester II tahun 2014 NTPH tertinggi terjadi pada bulan November 2014 yang mencapai 105,11 sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Agustus 2014 dengan NTPH sebesar 99,88.

2.2.3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Subsektor tanaman perkebunan rakyat memiliki nilai NTP yang lebih tinggi dibanding dengan NTP subsektor lainnya. Selama periode semester II tahun 2014 NTP sub sektor tanaman perkebunan rakyat berfluktuatif dan selalu berada di atas NTP Sulawesi Barat.

NTPR tertinggi terjadi di bulan Oktober yang mencapai 114,68 dengan nilai It dan Ib masing-masing sebesar 128,79 dan 112,31. NTPR terendah terjadi di bulan Desember yang hanya sebesar 108,46 dengan nilai It dan Ib masing-masing sebesar 125,82 dan 116,00. NTPR semester II tahun 2014 sebesar 112,24 atau meningkat sebesar 1,25 persen jika dibandingkan dengan semester I tahun 2014.

2.2.4. Subsektor Peternakan (NTP-T)

Pergerakan NTP subsektor peternakan cukup fluktuatif dan mencapai puncaknya pada Bulan Oktober 2014. NTPT pada semester II tahun 2014 mencapai 102,06 atau naik 0,76 persen jika dibandingkan semester sebelumnya. It dan Ib semester II ini masing-masing sebesar 111,84 dan 109,58. NTPT tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 103,09 dengan It dan Ib masing-masing sebesar 112,83 dan 109,44. Pada akhir semester II tahun 2014, NTP-T sebesar 100,45 atau turun sekitar 1,64 persen dibandingkan bulan November 2014.

2.2.5. Subsektor Perikanan (NTNP)

Sama seperti NTPP, selama semester II tahun 2014 NTPN juga di bawah 100. NTPN tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2014 sebesar 98,04 sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 96,26. NTPN periode semester II tahun 2014 adalah 97,44.

2.3. Perkembangan Inflasi Perdesaan

Inflasi perdesaan merupakan perubahan indeks konsumsi rumah tangga masyarakat perdesaan dalam kurun waktu tertentu biasanya dengan *range* waktu satu bulan. Kelompok pembentuk inflasi perdesaan terdiri dari kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan rekreasi dan olah raga dan kelompok transport dan komunikasi.

Pada semester II tahun 2014, inflasi perdesaan Sulawesi Barat sebesar 5,59 persen. Pendongkrak utama terjadinya inflasi berada pada kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 9,54 persen, kemudian diikuti oleh kelompok bahan makanan sebesar 7,79 persen. Dua kelompok yang mengalami inflasi paling kecil adalah kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga dan kelompok perumahan masing-masing sebesar 1,01 persen dan 1,83 persen.

Selama semester berjalan, deflasi perdesaan hanya terjadi pada Bulan September, yaitu sebesar -0,18 persen. Deflasi ini dipicu oleh turunnya indeks harga bahan makanan sebesar -0,65 persen dan kelompok transportasi dan komunikasi sebesar -0,17 persen. Sementara itu, kelima kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi.

Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember, sebagai penutup semester II tahun 2014, sebesar 2,46 persen. Tingginya inflasi pada Bulan Desember ini dipicu oleh naiknya indeks harga kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 4,91 persen, kelompok bahan makanan sebesar 3,38 persen, kelompok sandang sebesar 1,52 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,25 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar

1,10 persen, kelompok perumahan sebesar 0,54 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,36 persen.

2.4 Perbandingan Antar Provinsi Se Sulawesi

Pada semester II tahun 2014, dari enam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi sebagian besar NTP-nya sudah berada di atas 100, kecuali provinsi Sulawesi Utara yang masih dibawah 100 sekitar 99,29. Tiga provinsi mengalami perubahan positif dibandingkan semester I 2014, sedangkan tiga provinsi lainnya mengalami perubahan negatif. Provinsi yang mengalami perubahan positif adalah Gorontalo yang mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen, diikuti Sulawesi Barat yang meningkat sebesar 0,36 persen, dan Sulawesi Tenggara sebesar 0,15 persen. Sementara itu, Sulawesi Tengah mengalami perubahan negatif tertinggi, yaitu sebesar -1,41 persen, kemudian diikuti Sulawesi Utara sebesar -0,15 persen, dan terakhir Sulawesi Selatan sebesar -0,07 persen.

LAMPIRAN

**Tabel 1 Perkembangan NTP Menurut Sub sektor Tanaman Pangan,
Juli – Desember 2014**

Sub sektor	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Smt II
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1. Tanaman Pangan							
a. Indeks yang Diterima (It)	100,93	101,05	100,92	102,87	104,67	106,14	102,76
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	110,10	110,72	110,53	111,05	111,75	114,20	111,39
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	91,67	91,27	91,30	92,63	93,66	92,94	92,25
2. Hortikultura							
a. Indeks yang Diterima (It)	110,95	110,59	113,27	115,17	117,48	115,29	113,79
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	110,08	110,73	110,56	111,16	111,76	114,21	111,42
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	100,79	99,88	102,44	103,60	105,11	100,94	102,13
3. Tan. Perkebunan Rakyat							
a. Indeks yang Diterima (It)	125,17	126,40	126,12	128,79	126,86	125,82	126,53
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	111,23	111,94	111,74	112,31	113,15	116,00	112,73
c. Nilai Tukar Petani (NTP-R)	112,54	112,92	112,87	114,68	112,12	108,46	112,24
4. Peternakan							
a. Indeks yang Diterima (It)	110,33	110,88	112,00	112,83	112,48	112,50	111,84
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	108,31	108,81	108,78	109,44	110,14	112,00	109,58
c. Nilai Tukar Petani (NTP-T)	101,86	101,91	102,96	103,09	102,12	100,45	102,06
5. Perikanan							
a. Indeks yang Diterima (It)	108,08	108,81	108,06	109,34	110,15	112,31	109,49
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	110,37	111,23	111,06	111,53	113,14	116,67	112,34
c. Nilai Tukar Petani (NTN)	97,93	97,83	97,29	98,04	97,36	96,26	97,44
Gabungan :							
a. Indeks yang Diterima (It)	113,26	113,79	114,33	116,25	116,37	116,07	115,01
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	110,12	110,75	110,60	111,18	111,95	114,47	111,51
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,85	102,74	103,37	104,56	103,95	101,40	103,14

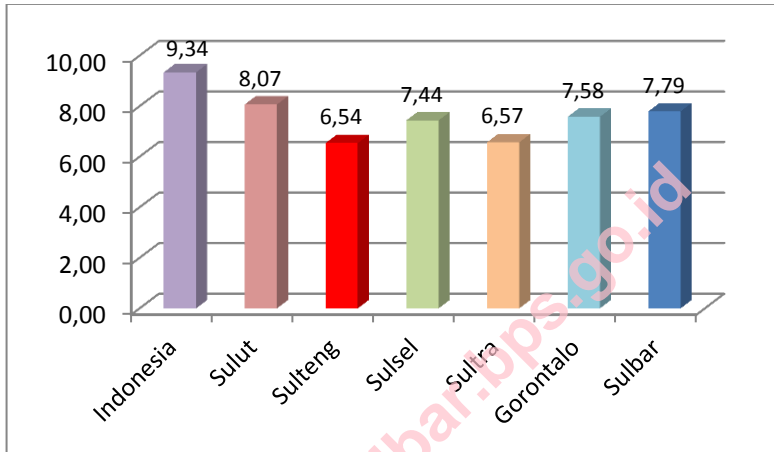
Tabel 2 Perkembangan Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok, Juli - Desember 2014

Kelompok	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Smt II
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)
Bahan Makanan	2,73	1,06	-0,65	1,07	0,02	3,38	7,79
Makanan Jadi	0,38	0,10	0,50	0,29	0,43	1,10	2,83
Perumahan	0,12	0,40	0,17	0,18	0,40	0,54	1,83
Sandang	0,94	0,96	0,18	0,38	0,79	1,52	4,87
Kesehatan	0,11	0,11	0,07	0,51	0,17	1,25	2,23
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0,03	0,39	0,05	0,07	0,11	0,36	1,01
Transportasi & Komunikasi	0,13	0,57	-0,17	0,01	3,86	4,91	9,54
Inflasi Perdesaan	1,33	0,66	-0,18	0,59	0,62	2,46	5,59

Tabel 3 Nilai Tukar Petani Provinsi dan Persentase Perubahannya Semester II Tahun 2014 (2007=100)

PROVINSI	IT		IB		NTP	
	INDEKS	% PERB	INDEKS	% PERB	RASIO	% PERB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	112,75	2,37	113,56	2,52	99,29	-0,15
Sulawesi Tengah	114,43	1,67	112,80	3,12	101,45	-1,41
Sulawesi Selatan	119,58	3,83	113,50	3,90	105,35	-0,07
Sulawesi Tenggara	114,86	4,10	113,29	3,94	101,39	0,15
Gorontalo	116,37	3,56	114,52	2,96	101,62	0,58
Sulawesi Barat	115,01	3,62	111,51	3,25	103,14	0,36

Grafik 1 Perbandingan Inflasi Perdesaan Provinsi Se-Sulawesi (Persen), Semester II Tahun 2014



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan RE Martadinata No. 10 Mamuju Telp. (0426) 2703340 Fax. (0426) 22103
Email: sulbar@bps.go.id Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>